

TRANSPARANSI KEUANGAN DAN KINERJA PADA WEBSITE PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA¹

Dwi Martani¹
Debby Fitriasari²
Annisa³

Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

¹martani@ui.ac.id

²debby.fitriasari@ui.ac.id

³annisa.syahrial2007@gmail.com

Abstrak

E-government di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 3/2003. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan implementasi dari peraturan tersebut dengan fokus pada aspek transparansi pengungkapan informasi keuangan dan kinerja. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif terhadap website resmi Pemda tingkat dua di Indonesia. Periode pengamatan website dilakukan pada pertengahan Mei sampai dengan akhir Juli 2013. Terdapat 429 website Pemda yang berhasil diakses dan dianalisis lebih lanjut. Dengan berdasarkan ceklis yang dibuat, tingkat transparansi informasi keuangan dan kinerja Pemda mencapai 15%. Pemda paling banyak mengungkapkan informasi keuangan dan kinerja dalam bentuk berita dan informasi Pemda Dalam Angka. Sedangkan untuk informasi utama keuangan dan kinerja yang berupa APBD, laporan keuangan dan laporan kinerja ternyata pengungkapannya masih di bawah 10%. Dari 11 pemda dengan pengungkapan tertinggi, 7 Pemda berada di Pulau Jawa dan berbentuk kota.

E-government in Indonesia is starting since the issuance of Presidential Instruction No. 3/2003. The objective of this research to analysis the development of e-government which focuses on the financial and performance information transparency. Using a descriptive analysis on the 429 Indonesian local government websites during mid-May to July 2013, this research finds that the level of financial and performance information transparency is 15%. Most local government website disclose financial and performance information in the form of news and Local Government in Figures. While for the most important financial and performance information in the form of budgets, financial statements and performance reports are disclosed only by not more than 10% local government. From eleven local government with the best score, seven are located in Java and in the form of city.

Keywords: *e-government, financial information, local government website, performance report, transparency.*

¹ Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian yang mendapatkan dana hibah penelitian dari UI-DIKTI tahun 2013.

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar bisa dinilai kebenaran dan keandalan dari informasi terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan berjalannya kedua proses tersebut maka diharapkan akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah dapat lebih dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan Pedoman Umum *Good Public Governance* (GPG), selain akuntabilitas, transparansi juga merupakan salah satu asas yang harus dipenuhi demi terwujudnya GPG (KNKG, 2010). Dengan demikian, salah satu langkah untuk mewujudkan GPG maka Pemda harus menyediakan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh para pihak yang berkepentingan, baik pemerintah pusat, masyarakat maupun pihak lain. Asas transparansi ini juga sejalan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dimana salah satu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Pemda sebagai badan publik adalah informasi mengenai laporan keuangan.

Selanjutnya, UU KIP menyatakan bahwa informasi publik hendaknya disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Styles dan Tennnyson (2007) mengatakan bahwa internet merupakan media yang saat ini paling mudah dijangkau oleh masyarakat dan paling *cost effective* bagi pemerintah untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Selain itu, penggunaan website dan teknologi informasi ini juga merupakan aplikasi dari penerapan *e-*

government yang akan memegang peranan penting dalam pelaksanaan pemerintahan di masa mendatang (Moon, 2002).

Penelitian terkait dengan website pemerintah sebagai aplikasi dari *e-government* sudah banyak dilakukan di luar negeri. Di Amerika, *e-government* dimulai pada tahun 1995 dimana hanya sekitar 8,7% pemerintah lokal yang pada saat itu menggunakan website, namun angka tersebut naik menjadi lebih dari 90% hanya dalam waktu sekitar 5 tahun (Holden et al., 2003). Selain di Amerika, penelitian tentang perkembangan *e-governance* juga dilakukan di Korea Selatan (Kim and Kim, 2003), India (Rupanagunta, 2006), Srilanka (Karunasena and Deng, 2011), Bhutan (Miyata, 2011), Spanyol (Navarro et al., 2012), dan China (Yuan et al., 2012).

Di Indonesia, perkembangan penggunaan website oleh Pemda di Indonesia dimulai dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia yang diperjelas dengan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 (Inpres No. 3/2003) tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Selama 3 tahun sejak berlakunya Inpres No. 6 tahun 2001, hanya 182 dari 385 Pemda (kabupaten, kota, dan propinsi) yang memiliki website dan dari 182 website tersebut hanya 150 yang bisa diakses (Rose, 2004). Hermana dan Silfianti (2011) melakukan evaluasi terhadap 181 website Pemda dengan fokus pada *feature*, aspek promosi dan informasi umum. Selanjutnya, pada awal 2010 Puspita dan Martani (2012) melakukan pengamatan terhadap website Pemda dan menemukan 168 website Pemda (kabupaten, kota, dan propinsi) yang dapat diakses sedangkan Medina (2012) melakukan pengamatan pada akhir 2010 dan berhasil menganalisis 257 website

Pemda tingkat dua. Penelitian terbaru Hermana et al. (2012) pada Juni 2011 berhasil mengakses dan menganalisis 424 website Pemda. Dari penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat adanya trend kenaikan jumlah website Pemda yang bisa diakses oleh publik.

Selain masalah aksesibilitas, poin penting yang juga dikemukakan oleh Rose (2004) adalah bahwa sebagian besar website Pemda tidak memberikan informasi secara detail mengenai pembayaran pajak individu dan informasi keuangan serta anggaran Pemda. Penelitian mengenai pengungkapan informasi keuangan dalam website Pemda dimulai oleh Laswad et al. (2005) dengan sampel Pemda di New Zealand dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat pengungkapan tersebut. Dilanjutkan oleh Styles and Tennyson (2007) pada 300 Pemda di Amerika dan Serrano et al, (2008) pada 92 Pemda di Spanyol dengan hasil bahwa 53% dari sampel penelitian mengungkapkan informasi keuangan dalam website.

Di Indonesia, Sinaga (2011) serta Puspita dan Martani (2012) melanjutkan penelitian Laswad et al. (2005) terhadap Pemda di Indonesia. Sampel Puspita dan Martani (2012) adalah 108 Pemda di Indonesia dengan fokus tidak hanya di informasi keuangan saja namun juga informasi umum lainnya. Hasil dari Puspita dan Martani (2012) menunjukkan bahwa website Pemda masih sedikit yang mengungkapkan informasi keuangan. Medina (2012) melanjutkan penelitian Styles and Tennyson (2007) dengan sampel 257 Pemda tingkat dua dan menemukan hasil bahwa hanya 35 (16%) Pemda yang menyajikan informasi keuangan daerah dalam website mereka dan website kota Cimahi merupakan website yang paling tinggi tingkat penyediaan dan aksesibilitas atas informasi keuangan tersebut. Penelitian Hermana et al. (2012) terhadap 424

website Pemda di bulan Juni 2011 menemukan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan informasi keuangan dalam website Pemda hanya mencapai 19%.

Dengan mempertimbangkan beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan website yang dimiliki oleh Pemda di Indonesia, penelitian ini secara umum bertujuan untuk melihat bagaimana perkembangan *e-government* di Indonesia setelah 10 tahun dikeluarkannya Inpres No. 3/2003, dengan fokus pada aspek akuntabilitas dan transparansi keuangan serta kinerja. Pemilihan fokus ini dibuat dengan pertimbangan bahwa dari beberapa penelitian sebelumnya diperoleh hasil bahwa pengungkapan informasi keuangan dalam website Pemda tidak sebaik kelengkapan *feature* dan pelayanan Pemda (Rose, 2004; Hermana et al., 2012).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya (Puspita dan Martani, 2012; Medina, 2012; dan Hermana et al. (2012)) adalah penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana akuntabilitas dan transparansi Pemda terkait dengan kinerja yang telah dilakukannya. Hal ini perlu untuk dilakukan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007, Pemda memiliki kewajiban untuk memberikan informasi terkait penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Selain itu, Pemda juga diwajibkan untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian, fokus penelitian ini adalah tingkat pengungkapan informasi keuangan dan kinerja Pemda dalam website yang

mereka miliki. Untuk mengukur tingkat pengungkapan tersebut, dibuat ceklis dengan acuan dari Perez et al. (2005) dan Garcia-Sanchez et al. (2013). Ceklis (Lampiran 1) terdiri dari lima bagian besar kelompok indikator yaitu:

1. Berita tentang keuangan, berupa berita tentang proses anggaran, penyerapan anggaran, laporan keuangan Pemda dan hasil audit BPK
2. APBD terdiri dari APBD awal, APBD perubahan dan realisasi APBD
3. Laporan Keuangan terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
4. Laporan Kinerja terdiri dari LAKIP, LPPD dan ILPPD
5. Daerah Dalam Angka

Setelah ceklis dibuat, dilakukan pengamatan pada masing-masing website Pemda untuk dinilai ketersediaan informasi yang ada berdasarkan ceklis tersebut. Jika terdapat informasi akan diberi nilai 1 dan jika tidak ada akan diberi nilai 0. Nilai tingkat pengungkapan diperoleh dengan membagi jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Pemda dengan total keseluruhan item ceklis (17 item).

Selanjutnya dari data tingkat pengungkapan yang diperoleh berdasarkan ceklis tersebut kemudian akan dilakukan analisis deskriptif untuk melihat bagaimana tingkat pengungkapan Pemda secara umum dan berdasarkan masing-masing kelompok indikator.

PEMBAHASAN

Dari 491 pemerintah kabupaten/kota, hanya 429 website yang bisa dianalisis, yakni sebesar 87.4% dari populasi pemerintah kabupaten/kota. Jumlah website yang dianalisis lebih

banyak daripada Hermana et al. (2012) yang berhasil menganalisis 391 website Pemda tingkat dua. Dengan kata lain, terdapat 62 Pemda kabupaten/kota yang tidak memiliki website resmi atau websitenya tidak bisa diakses pada saat pengumpulan data (pertengahan Mei - Juli 2013).

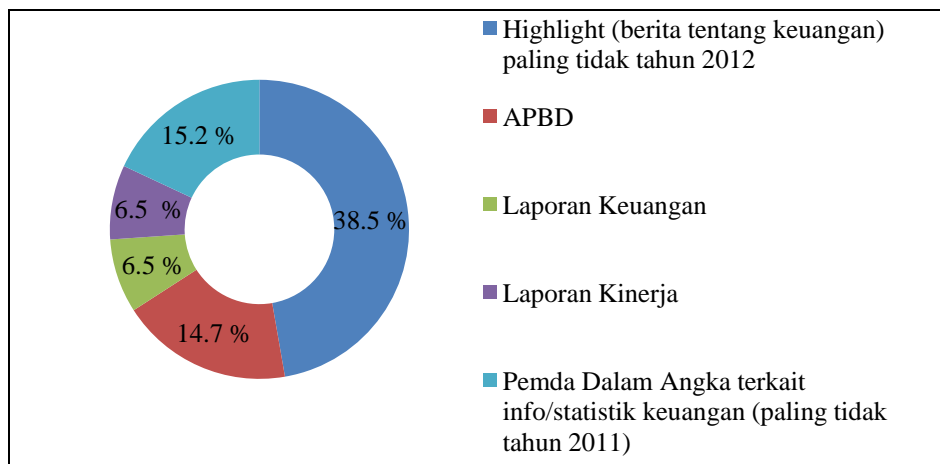
Berdasarkan ceklis yang ada di Lampiran 1, diperoleh indeks rata-rata transparansi/pengungkapan keuangan dan kinerja Pemda sebesar 15%². Angka indeks rata-rata ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan indeks yang dihasilkan oleh Hermana et al. (2012) yaitu sebesar 19%. Hal ini kemungkinan disebabkan karena perbedaan ceklis yang dimiliki antara kedua penelitian. Sebagai contoh, ceklis Hermana et al. (2012) memasukkan ketersediaan peraturan daerah dalam website sebagai salah satu indikator dimana dokumen ini ternyata paling banyak diungkapkan dalam website Pemda (53.6%) sedangkan penelitian ini tidak memasukkannya sebagai indikator. Selain itu, dari total 429 Pemda yang diobservasi, 40% nya atau 202 Pemda sama sekali tidak menyajikan atau mengungkapkan informasi terkait keuangan dan kinerja. Masih rendahnya nilai indeks rata-rata pengungkapan informasi keuangan dan kinerja ini menunjukkan bahwa selama 10 tahun pelaksanaan *e-government* di Indonesia, Pemda masih belum memprioritaskan pengungkapan informasi keuangan dalam website mereka. Hal ini kemungkinan disebabkan karena Pemda masih berfokus pada penyediaan informasi minimal sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi pada

² Angka rata-rata pengungkapan ini tidak mempertimbangkan website-website yang bisa diakses namun tingkat pengungkapan 0% (tidak terdapat informasi keuangan dan atau kinerja sesuai ceklis yang disajikan dalam websitenya)

tahun 2003 serta penyediaan *feature* pelayanan sesuai dengan hasil penelitian Rose (2004) dan Hermana et al. (2012).

Selanjutnya, berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui bahwa kelompok indikator penyajian berita terkait informasi keuangan dan indikator Pemda dalam Angka/Statistik Keuangan merupakan kelompok indikator yang paling banyak diungkapkan oleh website Pemda. Dari hasil ini bisa disimpulkan bahwa Pemda

lebih memilih memberikan informasi keuangan yang bersifat umum dan dimasukkan dalam data statistik daerah dibandingkan dengan data anggaran dan laporan keuangan secara mandiri. Kenyataan ini tentu tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 65/2005 pasal 13b yang mewajibkan informasi keuangan daerah, berupa anggaran dan laporan keuangan, disajikan dalam website resmi Pemda.



Gambar 1. Persentase Website Pemda yang Menyajikan Informasi per Kelompok Indikator

Tabel 1. Persentase Website Pemda yang Menyajikan per Item Informasi

No	> 20% Pemda	10-20% Pemda	< 10% Pemda
1	Berita tentang Penyerapan Anggaran	Berita tentang Hasil audit BPK	Berita tentang Laporan Keuangan
2	Berita tentang Proses Anggaran	Pemda Dalam Angka terkait info/statistik keuangan (paling tidak tahun 2011)	Laporan Realisasi Anggaran 2011/2010
3		APBD Awal 2013/2012	Neraca 2011/2010
4			APBD Perubahan 2012/2011
5			Laporan Arus Kas 2011/2010
6			LAKIP 2011/2010
7			ILPPD 2011/2010
8			LPPD 2011/2010
9			Catatan atas Laporan Keuangan 2011/2010
10			APBD Awal menurut urusan pemerintahan 2013/2012
11			Realisasi APBD per kuartal 2012/2011
12			APBD Perubahan detail per urusan pemerintahan 2012/2011

Jika dilihat per jenis item, Tabel 1 menunjukkan informasi yang paling banyak disajikan oleh Pemda dalam websitenya. Dua puluh lima persen (25%) website Pemda menyajikan berita mengenai penyerapan anggaran dan 22.4% menyajikan berita mengenai proses anggaran. Hal ini sangat beralasan karena berita mengenai penyerapan anggaran bisa menjadi media promosi bagi Pemda tersebut terkait dengan keberhasilan pelaksanaan program atau anggaran yang dilakukannya. Berita mengenai hasil audit BPK juga ditampilkan oleh sebagian website Pemda, baik Pemda yang menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) maupun yang menerima opini wajar dengan pengecualian (WDP). Beberapa website Pemda yang menampilkan berita terkait hasil audit BPK dengan opini WDP memberikan penjelasan mengenai tindak lanjut memo audit. Sedangkan berita terkait laporan keuangan sangat jarang ditampilkan pada website Pemda, hanya 7% Pemda yang memberitakan mengenai laporan keuangan daerah.

Untuk informasi keuangan dan kinerja, dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa jenis informasi yang paling banyak disajikan dalam website Pemda adalah berupa APBD awal. Sedangkan untuk informasi berupa laporan keuangan dan laporan kinerja, persentase website Pemda yang menyajikan laporan-laporan tersebut tersebut masih sangat sedikit yaitu kurang dari 10%. Hasil ini konsisten dengan penelitian Medina (2012) yang melakukan observasi terhadap 257 website Pemda dan menemukan bahwa dari 35 website yang menyajikan informasi keuangan pada akhir tahun 2011, hanya 6 website Pemda yang tidak menyajikan informasi tentang APBD. Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa dari keempat laporan keuangan, laporan yang paling banyak disajikan adalah laporan realisasi ang-

garan, menyusul neraca, laporan arus kas dan terakhir catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk laporan kinerja, laporan yang paling banyak disajikan adalah LAKIP, ILPPD dan terakhir LPPD. Bentuk informasi keuangan dalam website Pemda sebagian besar dalam bentuk *attachment*, bukan di halaman website Pemda secara langsung (*face*).

Hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa Pemda lebih cenderung memberikan informasi berupa anggaran daerah yang dimilikinya daripada informasi keuangan lainnya. Hal ini kemungkinan karena informasi dan berita-berita terkait dengan penyerapan dan proses anggaran dianggap lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan dapat menunjukkan kinerja dari Pemda secara langsung daripada informasi berbentuk laporan keuangan dan kinerja yang lebih ditujukan untuk kepentingan pelaporan kepada pemerintah pusat. Lebih lanjut, berdasarkan Gambar 1 dan Tabel 1 di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesiapan Pemda dalam mengimplementasikan *e-government* sesuai Inpres No. 3/2003 khusus untuk penyajian informasi keuangan dan laporan kinerja masih berada dalam tahap atau tingkat 1 yaitu persiapan. Hal ini juga didukung dengan hasil pengamatan bahwa di sebagian website terdapat menu khusus dan/atau link untuk memperoleh informasi atau dokumen keuangan dan kinerja namun menu khusus dan/atau link tersebut tidak menyediakan tampilan informasi atau dokumen sesuai dengan yang diinginkan. Adanya menu khusus dan/atau link tersebut menjadi indikator bahwa Pemda telah mempertimbangkan informasi-informasi keuangan dan kinerja sebagai informasi yang perlu ditampilkan dalam website mereka meskipun belum terdapat dokumennya.

Apabila dilihat dari prestasi Pemda secara individu, maka Pemda Kota

Tangerang memiliki indeks tertinggi dengan nilai 64.7%. Terdapat 11 informasi yang disajikan Kota Tangerang dari total 17 item ceklis penelitian. Informasi yang secara lengkap disajikan oleh Kota Tangerang adalah informasi mengenai berita tentang keuangan, seluruh jenis laporan keuangan dan Pemda dalam angka (Tabel 3).

Dari Tabel 2 dapat dilihat 11 website Pemda dengan tingkat pengungkapan informasi keuangan dan kinerja tertinggi. Dari kesebelas Pemda dengan nilai tertinggi tersebut, yang berada di Pulau Jawa lebih banyak daripada di luar Pulau Jawa. Data ini didukung dengan hasil observasi terhadap keseluruhan website dimana untuk website pemda yang berada di Pulau Jawa memiliki rata-rata pengungkapan 11% dibandingkan dengan yang berada di luar Pulau Jawa yaitu 7%. Hasil ini sejalan dengan Hermana et al. (2012). Salah satu penyebab kondisi ini adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten

dalam bidang keuangan dan sistem informasi di Pemda luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan-pelatihan yang dapat mendorong pemahaman akan pentingnya transparansi informasi keuangan dan kinerja serta meningkatkan kompetensi dari para pegawai Pemda.

Lebih lanjut, dari Tabel 2 juga dapat diketahui bahwa dari 11 pemda dengan nilai tertinggi, 7 pemda berbentuk kota sedangkan 4 sisanya berbentuk kabupaten. Jika dilihat rata-rata tingkat pengungkapan dari keseluruhan website yang diobservasi, pemda dengan bentuk kota memiliki rata-rata tingkat pengungkapan 12% dibandingkan dengan kabupaten sebesar 7%. Hasil ini konsisten dengan Laswad et al. (2005) dan Medina (2012) dimana untuk Pemda dengan tipe kota memiliki penduduk yang lebih besar dan beragam sehingga tuntutan terhadap informasi yang diungkapkan dalam website Pemda lebih banyak.

Tabel 2. Pemda dengan Tingkat Pengungkapan Tertinggi

No	Kabupaten/Kota	Provinsi	Ceklis Keseluruhan Item Indikator	
			Ceklis Keseluruhan Item Indikator	Persentase
1	Kota Tangerang	Banten	11	64.7%
2	Kab. Padang Pariaman	Sumatera Barat	10	58.8%
3	Kota Solok	Sumatera Barat	9	52.9%
4	Kota Batam	Kepulauan Riau	8	47.1%
5	Kab. Bogor	Jawa Barat	8	47.1%
6	Kab. Bandung	Jawa Barat	8	47.1%
7	Kab. Subang	Jawa Barat	8	47.1%
8	Kota Sukabumi	Jawa Barat	8	47.1%
9	Kota Cimahi	Jawa Barat	7	41.2%
10	Kota Surabaya	Jawa Timur	7	41.2%
11	Kota Ambon	Maluku	7	41.2%

Jika dilihat dari informasi yang disajikan oleh kesebelas Pemda dengan nilai tertinggi (Tabel 3), dapat dilihat bahwa informasi yang paling banyak tidak diungkapkan adalah informasi mengenai laporan kinerja. Terdapat 7 website yang tidak mencantumkan apapun jenis laporan kinerja, baik yang berbentuk LAKIP, LPPD, maupun ILPPD. Bahkan, kota Tangerang dengan nilai pengungkapan tertinggi, juga tidak menyajikan laporan kinerja dalam websitenya. Alasan tidak dicantumkannya laporan kinerja dalam website kota Tangerang bukan karena kinerja Pemda tersebut kurang baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) pada tahun 2011, kota Tangerang meru-

pakan Pemda tingkat dua kota yang memiliki nilai EKPPD tertinggi. Jadi, kemungkinan alasan tidak dimasukkannya laporan kinerja dalam website Pemda karena LAKIP dan LPPD merupakan laporan Pemda kepada pemerintah pusat sehingga Pemda tidak (belum) merasa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tersebut kepada masyarakat luas. Begitu juga untuk ILPPD, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 A tahun 2007, laporan kepada masyarakat ini boleh disampaikan oleh Pemda melalui media cetak atau elektronik. Dengan demikian, karena sifatnya tidak wajib maka Pemda memilih media lain dalam penyebaran laporan ILPPD.

Tabel 3. Nilai Tingkat Pengungkapan per Kelompok Informasi Pemda dengan Tingkat Pengungkapan Tertinggi

No	Pemda	Kelompok Indikator (%)				Pemda Dalam Angka (info/statistik keuangan)
		Highlight (berita tentang keuangan)	APBD	Laporan Keuangan	Laporan Kinerja	
1	Kota Tangerang Kab. Padang	100	40	100	0	100
2	Pariaman	75	40	100	0	100
3	Kota Solok	50	60	100	0	0
4	Kota Batam	100	40	50	0	0
5	Kab. Bogor	75	40	0	67	100
6	Kab. Bandung	50	40	50	33	100
7	Kab. Subang	75	20	75	0	100
8	Kota Sukabumi	100	0	0	100	100
9	Kota Cimahi	25	40	100	0	0
10	Kota Surabaya	25	20	100	33	0
11	Kota Ambon	0	80	75	0	0

SIMPULAN DAN SARAN

Dari total 491 Pemda tingkat dua, hanya 429 website yang berhasil diakses dan diamati sepanjang pertengahan Mei sampai akhir Juli 2013. Berdasarkan ceklis yang telah dibuat maka diperoleh tingkat transparansi informasi keuangan

dan kinerja dalam website resmi Pemda hanya sebesar 15%. Hal ini menunjukkan bahwa selama 10 tahun implementasi pengembangan *e-government* di Indonesia, terutama untuk transparansi informasi keuangan dan kinerja, Pemda masih berada pada tahap awal yaitu persiapan. Informasi utama

keuangan dan kinerja berupa data APBD, laporan keuangan serta laporan kinerja ternyata masih sangat minim disajikan oleh Pemda dalam website mereka. Terdapat 47% Pemda yang tidak menyajikan informasi apapun terkait dengan informasi keuangan dan kinerja dalam websitenya. Dari sebelas Pemda dengan tingkat transparansi tertinggi, tujuh Pemda berada di pulau Jawa dan berbentuk kota.

Dengan mempertimbangkan bahwa masih banyak Pemda yang belum mengungkapkan informasi keuangan dan kinerja dalam websitenya maka disarankan agar:

1. Pemda segera mempersiapkan sumber daya manusia dan sistem informasinya sehingga bisa dengan segera menyajikan informasi keuangan maupun kinerja dalam website sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 56/2005.
2. Lebih banyak diberikan pelatihan-pelatihan kepada pegawai yang relevan di Pemda mengenai pentingnya transparansi informasi keuangan dan kinerja dan peningkatan kapasitas pegawai terkait keuangan dan sistem informasi.
3. Pemerintah Pusat memberikan peraturan yang lebih jelas dan tegas mengenai kewajiban Pemda terkait transparansi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja Pemda.

DAFTAR PUSTAKA

- Garcia, I.M.S., Frias, J.V.A., and Rodriguez, L.D. 2013. "Determinants of Corporate Social Disclosure in Spanish Local Governments". *Journal of Cleaner Production* 39: 60-72.
- Hermana, B., Tarigan, A., Medyawati, and H., Silfianti, W. 2012. Information Richness, Website Feature, and Financial Transparency on the Local Government Website in Indonesia. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, Vol 43 No.2: 229-235.
- Holden, S.H., Norris, D.F., and Fletcher, N.P. 2003. Electronic Government at the Local Level: Progress to Date and Future Issues. *Public Performance & Management Review*, Vol. 26, No. 4: 325-344.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan Dan Pendayagunaan Telematika Di Indonesia
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*
- Karunasena, K. and Deng, H. 2012. Critical Factors for Evaluating the Public Value of e-Government in Sri Lanka. *Government Information Quarterly* 29: 76-84.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2003. *Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah*.
- Kim, S. and Kim, D. 2003. South Korean Public Officials' Perceptions of Values, Failure, and Consequences of Failure in e-Government Leadership. *Public Performance & Management Review*, Vol. 26, No. 4: 360-375.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2010. *Pedoman Umum Good Public Governance*.
- Medina, Febri. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Skripsi. Universitas Indonesia.
- Moon, M, Jae. 2002. The Evolution of E Government among Municipalities: Rhetoric or Reality? *Public*

- Administration Review*, July/Agust, Vo 62 (4): 424-433.
- Navvaro, J.G.C., Pachon, J.R.C., Ceggara, J.L.M. 2012. E-Government and Citizen's Engagement with Local Affairs Through e-Websites: The Case of Spanish Municipalities. *International Journal of Information Management* 32: 469– 478.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 A Tahun 2007 Tentang Tatacara Penyampaian Informasi Dan Tanggapan Atau Saran Dari Masyarakat Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
- Perez, C.C., Hernandez, A.M.L., and Bolivar, M.P.R. 2005. Citizens' Access to On-Line Governmental Financial Information: Practices in the European Union Countries. *Government Information Quarterly* 22: 258-276.
- Puspita, Rora., Dwi Martani. 2012. *Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Sukarela Pada Website Pemda Tahun 2010*. Paper dipresentasikan dalam Simposium Nasional Akuntansi 15, Balikpapan, 20-21 September 2012.
- Rachmawati, U.A., Sensuse, D.I., Suhartanto, H. 2012. Initial Model of Indonesian e-Government Grid Services Topology. *International Journal of Computer Theory and Engineering*, Vol. 4, No. 4: 656-661.
- Rose, M. 2004. Democratizing Information and Communication by Implementing e-Government in Indonesian Regional Government. *The International Information & Library Review* 36: 219–226.
- Rupanagunta, K. 2006. E-Governance in Public Financial Management: An Overview. *IIMB Management Review*: 403–413
- Serrano-Cinca, Carlos, Mar Rueda-Tomas, Pilar Portillo-Tarragona. (2008). *Factors Influencing E-Disclosure In Local Public Administrations*. Working Paper No. 2008-03, Facultad De Ciencias Economicas Y Empresariales, Universidad De Zaragoza.
- Sinaga, Y.F. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet Secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Styles, Alan K., Mack Tennyson. 2007. The Accessibility Of Financial Reporting U.S. Municipalities On The Internet. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 19 (1): 56-92.
- Yuan, L., Xi, C., & Xiaoyi, W. 2012. Evaluating the Readiness of Government Portal Websites in China to Adopt Contemporary Public Administration Principles. *Government Information Quarterly* 29: 403–412.

Lampiran 1. Daftar Ceklis

Kode	Kriteria	Paper Acuan
	Highlight (berita tentang keuangan) paling tidak tahun 2012	
1	proses Anggaran	Garcia-Sanchez et al. (2013)
2	Penyerapan Anggaran	
3	LK	
4	Hasil audit BPK	
	Menu khusus APBD dan/atau LK dan/atau keuangan	
	APBD	Perez et al. (2005)
5	APBD Awal 2013 atau 2012	
6	APBD Awal menurut urusan pemerintahan 2013 atau 2012	
7	APBD Perubahan 2012 atau 20121	
8	APBD Perubahan detail per urusan pemerintahan 2012 atau 2011	
9	Realisasi APBD per kuartal 2012 atau 2011	
	Laporan Keuangan	Garcia-Sanchez et al. (2013)
10	Neraca 2011 atau 2010	
11	Laporan Realisasi Anggaran 2011 atau 2010	
12	Laporan Arus Kas 2011 atau 2010	
13	Catatan atas Laporan Keuangan 2011 atau 2010	
	Laporan Kinerja	Garcia-Sanchez et al. (2013), Perez et al. (2005)
14	LAKIP 2011 atau 2010	
15	LPPD 2011 atau 2010	
16	ILPPD 2011 atau 2010	
17	Pemda Dalam Angka terkait info/statistik keuangan (paling tidak tahun 2011)	Garcia-Sanchez et al. (2013)